

Kata Pengantar



Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kembali menegaskan komitmen Kementerian yang dipimpinnya untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka, termasuk REDD+.

“REDD+ sebisa mungkin melibatkan masyarakat di sekitar hutan,” katanya ketika membuka kegiatan komunikasi publik tentang hasil riset menjawab tantangan perubahan iklim.

Komitmen ini bukan untuk pertama kalinya didengungkan oleh beliau dan hal tersebut sejalan dengan misi yang diemban UN-REDD Programme Indonesia. Tak pelak lagi, kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atau FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) menjadi salah satu kegiatan yang didukung oleh UN-REDD Programme Indonesia.

Dua bulan terakhir ada serangkaian kegiatan konsultasi multi-pihak yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah yang merupakan tahapan persiapan dalam melaksanakan kegiatan REDD+ dan pembentukan kelompok kerja REDD+ di provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia tersebut.

Selain itu, kami juga mendukung Kementerian Kehutanan dalam menyusun sebuah peta jalan kehutanan (*forestry roadmap*) yang akan menjabarkan rencana pembangunan terkait sektor kehutanan jangka panjang. Sebuah peta jalan yang diharapkan dapat menjadikan REDD+ sebagai strategi dalam pembangunan kehutanan jangka panjang yang *pro job, pro poor, pro growth, dan pro environment*.

Sebagai bagian dari koordinasi internal, UN-REDD Programme Indonesia telah melaksanakan pertemuan *Programme Executive Board (PEB)* yang pertama untuk membahas dan mengesahkan beberapa keputusan penting yang menyangkut laporan kemajuan tahun 2010, rencana kerja tahun 2011, dan SOP (*Standard Operational Procedure*). Keputusan penting lain yang diambil pada kesempatan tersebut adalah rencana perpanjangan umur proyek hingga tahun 2012.

Sebelumnya, sebagai sebuah organisasi yang baru berdiri, UN-REDD Programme Indonesia mengadakan rapat koordinasi internal untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas pada pertemuan PEB yang dilanjutkan dengan *outbound* di Bandung. Kegiatan terakhir ini dipandang perlu untuk membangun kerja sama tim proyek sebagai sebuah organisasi yang baru berdiri.

Akhir kata, tahun 2011 ini merupakan tahun yang penuh harapan, termasuk di antaranya dalam rangka hari Tahun Kehutanan Internasional. Berbagai kegiatan dilaksanakan dan salah satunya, UN-REDD Programme Indonesia mendukung pelaksanaan pameran IndoGreen ketiga yang diadakan pada pertengahan April.

Yuyu Rahayu
National Project Director

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Dalam Edisi Ini	1
Menhut: REDD+ sebisa mungkin melibatkan masyarakat di sekitar hutan.....	2
Pertemuan Pertama Programme Executive Board UN-REDD Programme Indonesia	2
Lokakarya Tentukan Wakil Masyarakat Adat dan LSM dalam Pokja REDD+ Sulteng.....	3
Hadi Daryanto: Visi Pemerintah Membangun Masyarakat dengan cara Inklusif, <i>pro poor, pro job</i> dan <i>pro environment</i>	4
Kegiatan Lain UN-REDD Programme Indonesia	4
Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah.....	5
Konsultasi <i>Forestry Roadmap</i> dengan Pakar	5
Kata Mereka.....	6
Kabar Sulawesi Tengah.....	7
Kabar UN-REDD Programme Indonesia	7
Publikasi Terbaru	8
Hubungi Kami.....	8

Untuk informasi lebih lanjut tentang
UN-REDD Programme Indonesia
kunjungi : www.un-redd.or.id

Menhut: REDD+ Sebisa Mungkin Melibatkan Masyarakat di Sekitar Hutan

"REDD+ sebisa mungkin melibatkan masyarakat di sekitar hutan," tegas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Komunikasi Publik tentang Riset Menjawab Tantangan Perubahan Iklim : Implementasi REDD+ di Indonesia (Februari 2011).

Sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia harus menyukseskan REDD+, Kemenhut sedang menyiapkan perencanaan fundamental peta jalan (*Road Map*) Kehutanan 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun yang akan datang.

Dalam laporannya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemenhut Dr. Tachrir Fathony memberikan apresiasinya atas dukungan dari UN-REDD Programme Indonesia yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan komunikasi publik tersebut.

Beliau menekankan peran Badan Litbang Kemenhut dalam mengurangi dampak perubahan iklim, terutama terkait dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26%, dengan kemampuan sendiri. *"Research berusaha menjawab tantangan-tantangan operasional dalam perubahan iklim,"* kata Tachrir Fathony. *"Dan forum seperti ini diperlukan untuk*

mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian tentang perubahan iklim."

Ada beberapa isu yang harus dijawab lewat penelitian, antara lain: 1. Kesiapan implementasi REDD+ 2. Stok karbon 3. Skema pendanaan REDD+ 4. Distribusi manfaat dan tanggung jawab 5. Tantangan tata kelola kehutanan.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas tentang perubahan iklim, komunikasi publik merupakan modal awal membagi informasi tentang tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi dan pemanasan global sekarang ini. Metodologi penelitian perlu untuk dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Program Perubahan Iklim selain untuk meningkatkan kapasitas juga untuk menemukan ilmu-ilmu baru untuk mensejahterakan masyarakat melalui *Sustainable Forest Management (SFM)*.

Acara ini juga ditandai dengan penyerahan buku hasil penelitian Badan Litbang Kemenhut kepada Menteri Kehutanan.



▲ Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kiri) memperlihatkan buku hasil penelitian tentang REDD+ yang diserahkan oleh Kepala Badan Litbang Kemenhut Tachrir Fathony (kanan).



▲ Kepala Badan Litbang Kemenhut Tachrir Fathony (kanan) memberikan kenang-kenangan kepada Kazuyo Hirose dari Center for Sustainability Science of Hokkaido University (kiri).

Pertemuan Pertama Programme Executive Board UN-REDD Programme Indonesia

Pada tanggal 12 Januari 2011, untuk pertama kalinya anggota-anggota Program Executive Board (PEB) UN-REDD Programme Indonesia bertemu membahas beberapa isu penting, yaitu laporan kemajuan 2010, Rencana Kerja Tahun 2011, dan prosedur operasi standar.

Staf Ahli Menteri bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Dr. Yetti Rusli memimpin rapat yang dihadiri oleh para anggota PEB yang berasal dari UNDP, FAO, perwakilan kedutaan besar Norwegia, serta para pejabat dari direktorat terkait Kementerian Kehutanan dan perwakilan dari BAPPENAS.

UN Resident Coordinator El-Mostafa Benlamlih menekankan bahwa UN-REDD dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ memiliki sasaran-sasaran yang sama dan dapat bekerja bersama secara terbuka dan konstruktif agar dapat meraih kemajuan lebih pesat dalam bulan-bulan mendatang.

Pertemuan tersebut membuahkan beberapa butir kesepakatan. Pertama, persetujuan atas

Rencana Kerja Tahun 2011 dengan beberapa perubahan yang akan dibuat oleh masing-masing badan PBB. Kedua, laporan kemajuan (*progress report*) yang disampaikan Unit Manajemen Proyek (PMU) diterima dengan baik oleh para peserta rapat, demikian juga dengan prosedur operasi standar yang akan



▲ Suasana Pertemuan Program Executive Board UN-REDD Programme Indonesia di ruang rapat Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.

menjadi panduan PMU dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya.

Dua catatan penting lain adalah kesepakatan rapat untuk memperpanjang umur proyek hingga 2012 dan rencana pertemuan PEB berikutnya pada awal bulan April 2011 mendatang.



▲ Counselor Kedutaan Norwegia Mr. Jon Heikki Aas, salah satu anggota Tim Pengarah Program Executive Board.

Lokakarya Tentukan Wakil Masyarakat Adat dan LSM dalam Pokja REDD+ Sulteng

Selama dua hari (19-20 Januari 2011), UN-REDD Programme Indonesia mendukung kegiatan konsultatif multipihak untuk melaksanakan konsolidasi LSM/CSO dalam menjawab ide pembentukan Pokja dan menentukan perwakilannya yang akan duduk dalam Kelompok Kerja.



▲ Para peserta yang berasal dari berbagai lembaga swadaya masyarakat di Sulawesi Tengah dan panitia berfoto bersama selesai mengikuti lokakarya sehari penuh.

Lokakarya penentuan wakil yang diadakan oleh Masyarakat Adat dan oleh LSM ini merupakan tindak lanjut dari hasil lokakarya multi pihak penyusunan alur dan tata kerja Padiatapa yang dilaksanakan oleh UN-REDD Program Indonesia bersama dengan para pihak di Sulteng di Tanjung Karang, Kabupaten Donggala pada tanggal 28-29 Desember 2010.

Kedua kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kehutanan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutan pada lokakarya yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi Sulawesi Tengah Syafri Ka'ban itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Nahardi, MM menyampaikan penghargaannya kepada UN-REDD Programme Indonesia yang telah memberi dukungan penuh, termasuk pembiayaannya.

Selain itu, beliau juga mengingatkan para peserta agar konsep maupun implementasi proses Padiatapa dan penentuan wakil dalam Pokja REDD+ menekankan pada musyawarah (*libu ngata*) dan berperspektif gender. "Jangan hanya dikuasai oleh kaum laki-laki tetapi peran perempuan harus ikut dipertimbangkan,"katanya.

Sedangkan Dr. Machfudh dari UN-REDD Programme Indonesia mengingatkan bahwa negara-negara maju tidak akan memberikan kompensasi sebelum kita sendiri mampu menurunkan emisi. "Jadi tidak ada uang muka dalam penurunan emisi ini, semuanya akan kita lakukan sendiri dan setelah berhasil menurunkan emisi maka karbonnya akan dihitung, barulah diberikan kompensasi," tegasnya.

Sementara Ibu Susilowati dari Dinas Kehutanan menyampaikan bahwa, kegiatan lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi Gubernur Sulteng. Saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Surat Keputusan pembentukan kelompok kerja-kelompok kerja (Pokja) REDD+.

Tujuan pembentukan Pokja tersebut adalah untuk merencanakan dan mengawasi setiap kebijakan skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap

mekanisme pembayaran dan distribusi terkait REDD+ di tingkat regional direncanakan dibentuk empat buah sub kelompok kerja, yaitu: 1 Wilayah Percontohan Aktivitas atau *Demonstration Activity* (DA), 2. MRV, 3. Strategi Daerah (Strada), dan 4. Padiatapa (FPIC).

UN-REDD Programme Indonesia sendiri menunjuk Sulteng sebagai provinsi percontohan karena pengalihan hutan menjadi area penggunaan lain (APL) sangat signifikan. Sedangkan Dinas Kehutanan ditunjuk sebagai pelaksana di tingkat provinsi. Jadi, semua kegiatan yang dilaksanakan oleh UN-REDD Programme Indonesia harus dikoordinasikan dengan Dishut Provinsi Sulawesi Tengah.

Diskusi di dua hari tersebut berlangsung dinamis. Berbagai hal yang masih menjadi pertanyaan dan belum dipahami dibahas bersama di antara para peserta dan narasumber yang hadir. Para peserta berusaha merumuskan kriteria apa yang diharapkan dari orang-orang yang akan duduk sebagai wakil mereka di Pokja REDD+ yang akan dibentuk.

Markus dari Masyarakat Adat Dodolo, misalnya berpendapat bahwa konsep yang ditawarkan UN-REDD Programme Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan secara adat. Ia menyampaikan harapannya agar pelaksanaan proyek UN-REDD di Sulawesi Tengah dapat memperhatikan dan memadukan kearifan masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Pemilihan wakil masyarakat adat dan masyarakat lokal berlangsung relatif cepat dan mulus. Mereka yang menjadi wakil terpilih berdasarkan musyawarah dan kesepakatan semua peserta.

Sedangkan dalam pemilihan wakil LSM terjadi perdebatan yang lebih panjang terutama akibat perbedaan pemahaman di kalangan peserta tentang fungsi dan manfaat dari pembentukan kelompok kerja tersebut. Namun akhirnya kata sepakat berhasil dicapai dan para wakil LSM yang akan duduk dalam Pokja berhasil dipilih para peserta (lihat kotak).



▲ Para peserta dari kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal berdiskusi dengan santai merumuskan kriteria wakil mereka dalam Pokja REDD+.



▲ Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Nahardi, MM memberikan sambutan sekaligus membuka lokakarya.

Perwakilan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dalam Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah

1. Pokja MRV: Rizal Mahfud
2. Pokja DA: Andreas Lagimpu
3. Pokja STRADA: Ferdy Lumba
4. Pokja FPIC: Rukmini P. Toheke

Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah

1. Amran Tambaru (YMP)
2. Rahmat Saleh (KARSA)
3. Mutmainah Korona (KPPA)
4. Ardin Tahir (PEI/KP SHK)

Hadi Daryanto: Visi Pemerintah Membangun Masyarakat dengan Cara Inklusif; *pro poor, pro job, dan pro environment*

Selama dua hari (11-12 Januari 2011) di Jakarta, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengundang beragam pemangku kepentingan duduk bersama membangun konsensus, serta membahas dan menyusun konsep Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) dalam kegiatan REDD+ di Indonesia.



▲ Suasana diskusi pada kelompok masyarakat adat/lokal yang dipandu oleh Ketua Kamar Masyarakat DKN, Hedar Laudjeng.

Kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh UN-REDD Programme Indonesia ini diharapkan dapat menjadi ajang berbagi informasi terkini, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, dan merumuskan hikmah pembelajaran dan rekomendasi kebijakan instrumen Padiatapa. Ini dilakukan melalui proses yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan REDD+, seperti Satuan Tugas REDD+ dan Kementerian Kehutanan, LSM, organisasi masyarakat adat serta membangun jaringan di antara para pemangku kepentingan.

Ketika membuka acara, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengingatkan visi pemerintah membangun masyarakat dengan cara inklusif, *pro poor, pro job, dan pro environment*. Karena itu, beliau menekankan pentingnya Padiatapa, terutama dalam pelaksanaan REDD+. "Setiap kegiatan pembangunan harus melibatkan masyarakat dengan berdialog," katanya.

Sedangkan Ketua Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto mengatakan dalam sambutannya bahwa keberhasilan pelaksanaan REDD+ merupakan tantangan bagi kita semua. "Ketika bicara soal REDD+, saya menggunakan kacamata kuda agar berhasil. Hutan harus tetap ada dan terus berdiri," Kuntoro menegaskan.

Sementara Ketua Harian DKN Agus Setyarso menegaskan bahwa kebijakan terkait REDD+ hendaknya mempunyai ruang konsultasi yang luas. "Kita perlu meningkatkan proses konsultasi REDD+ di daerah yang sekaligus dapat dijadikan sebagai piranti untuk memperkuat hak-hak lokal," ia menyampaikan ajakan kepada para pihak.

Selain itu, Agus juga menambahkan pentingnya mengatasi "the drivers of deforestation," faktor-faktor pendorong perusakan hutan, yang ditimbulkan oleh kebijakan dan tindak usaha di luar sektor kehutanan.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), atau *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*, merupakan sebuah metode untuk meyakinkan partisipasi penuh masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dan pembuatan keputusan terkait

dengan implementasi kegiatan-kegiatan suatu proyek. Dalam hal implementasi kegiatan-kegiatan REDD+, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat tradisional/adat, serta masyarakat lain, yang kehidupannya bergantung pada keberadaan hutan.

Padiatapa atau FPIC mengandung empat elemen penting yaitu *free* (bebas), *prior* (sebelum), *informed* (diinformasikan), dan *consent* (persetujuan). Secara umum *bebas* berarti ketiadaan paksaan, intimidasi, atau manipulasi. *Sebelum* berarti izin telah dimintakan/dicari sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan *diinformasikan* mengandung makna bahwa informasi tentang kegiatan proyek harus sudah diberikan dan disebarluaskan ke masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. *Persetujuan* mensyaratkan perlunya dilakukan konsultasi dan partisipasi dengan niat baik di mana masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal ikut berpartisipasi melalui wakilnya – yang mereka pilih sendiri dan menentukan apakah setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas/proyek/kebijakan.

"Padiatapa sendiri bukan merupakan barang baru," Agus mengingatkan. Namun kita menemukan masalah dalam mendefinisikan Padiatapa. Sebenarnya Indonesia kaya dengan bahan-bahan untuk membuat sebuah rumusannya sendiri tentang definisi Padiatapa. Sebuah pengertian yang dapat mencakup keragaman berbasis lokal, yang bertolak dari tataran yang setara dengan memasukkan pengalaman dari Riau, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Papua. Jika terwujud, Indonesia akan punya posisi legal untuk bernegosiasi di tingkat internasional.

Sebagai tindak lanjut, DKN bersama UN-REDD Programme Indonesia mengadakan pertemuan lanjutan untuk merumuskan hasil dari konsultasi nasional yang akan dijadikan sebagai dasar draf rekomendasi kebijakan mengenai FPIC. Pertemuan yang melibatkan beberapa stakeholder nasional dan sub-nasional tersebut dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari 2011 di Bogor. Selanjutnya, draf rumusan kebijakan tersebut dibahas intensif secara on-line dan dalam forum kelompok diskusi di Gedung Manggala Wanabakti (Februari 2011).

Kegiatan Lain UN-REDD Programme Indonesia

Road Map Kehutanan

8 Maret 2010, Jakarta

Dialog Umum Perubahan Iklim

11 Maret 2011, Jakarta

Peluncuran Pokja REDD+ Sulawesi Tengah

14 Maret 2011, Palu

Asia Forum Carbon Update

14-17 Maret 2011, Bandung

Policy Board Meeting

21-23 Maret 2011, Hanoi, Vietnam

UNEP Mission

23-24 Maret 2011, Jakarta & Palu

Lokakarya Media Nasional

14-15 April 2011, Bogor

Indogreen Forestry Expo

14-17 April 2011, Jakarta

Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah

Sebagai provinsi percontohan, Sulawesi Tengah (Sulteng) telah aktif mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas kesiapan REDD+. Salah satu langkah penting yang diambil Sulteng adalah konsultasi multipihak untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+. Konsultasi itu melibatkan perwakilan masyarakat lokal, masyarakat adat, juga lembaga swadaya masyarakat yang mengarusutamakan gender (19-20 Januari 2011).



Setelah berbagai konsultasi multipihak itu dilalui, perwakilan masyarakat Sulteng sepakat untuk memilih wakil-wakil mereka untuk Pokja REDD+. Untuk itulah kemudian pada tanggal 8 Februari 2011 diadakan lokakarya penyusunan komposisi, tugas pokok, dan fungsi Pokja REDD+ yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja REDD+.

Pada acara yang dimotori Dinas Kehutanan (Dishut) Sulteng dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia itu para pemangku kepentingan dan wakil-wakil mereka membahas kerangka SK Pokja REDD+. Hal-hal yang menjadi topik pembahasan antara

lain judul, bahan pertimbangan, pokok-pokok penetapan, serta kedudukan dan susunan keanggotaan.

Susunan keanggotaan Pokja dibagi berdasarkan empat bidang yang berbeda dan menghasilkan empat kelompok kerja sebagai berikut:

- Kelompok Kerja I: Bidang Kebijakan Terkait Implementasi REDD+ (Strategi Daerah)
- Kelompok Kerja II: Bidang Kelembagaan dan Metodologi
- Kelompok Kerja III: Bidang *Demonstration Activities*

▲ Chief Technical Advisor UN-REDD Programme Indonesia Dr Machfudh mempresentasikan pengantarnya pada lokakarya penyusunan komposisi, tugas pokok, dan fungsi Pokja REDD+ di Sulawesi Tengah.

- Kelompok Kerja IV: Bidang-bidang FPIC, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat.

Berdasarkan pembagian tersebut, disusunlah deskripsi kerja setiap kelompok kerja. Di akhir lokakarya, para peserta berhasil menyusun kerangka SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* (Pokja REDD+) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Konsultasi Peta Jalan Kehutanan dengan Pakar

UN-REDD Programme Indonesia mendukung pelaksanaan serangkaian kegiatan konsultasi dengan pakar-pakar kehutanan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor, menyusun peta jalan kehutanan (*forestry roadmap*) di Yogyakarta (Februari 2011).



▲ Dirjen BUK Kemenhut Iman Santosa (kiri) dan, Staf Ahli Menteri Kehutanan Hadisusanto Pasaribu dalam diskusi dan konsultasi Road Map Kehutanan di Yogyakarta.

Kegiatan yang sebelumnya diawali di Bogor tersebut bertujuan mengumpulkan masukan dari para pakar terkait dengan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kehutanan yang rendah emisi. Dengan demikian, pembangunan sektor kehutanan diharapkan dapat memberi sumbangan signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja (*pro job*), pengentasan kemiskinan (*pro poor*), dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*), tanpa mengabaikan lingkungan hidup (*pro environment*).

Selain itu, *forestry roadmap* yang sedang disusun juga berfokus pada pengurangan

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Masukan dari para pakar yang terkumpul dalam rangkaian kegiatan konsultasi dan diskusi tersebut akan dipergunakan sebagai bahan perbaikan Rancangan Nol Peta Jalan Pembangunan Industri Kehutanan dan Taman Nasional di Indonesia: Menuju Pembangunan Kehutanan yang Rendah Emisi.



▲ Para pakar kehutanan berpartisipasi dan memberikan masukannya dalam diskusi dan konsultasi Road Map Kehutanan Menuju Pembangunan Kehutanan yang Rendah Emisi.

Kata Mereka



Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
Hadi Daryanto :

"UN-REDD Programme Indonesia bisa menjembatani *silent majority* agar didengar oleh pemerintah atau pengelola REDD+ di lokasi. Kalau tidak ada proyek ini siapa yang menjembatani itu?"



Counselor Kedutaan Norwegia
Mr. Jon Heikki Aas :

"Perwakilan dari masyarakat adat sebaiknya juga berpartisipasi pada Programme Executive Board UN-REDD"



Sekretaris Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah
Ir. Susilowati :

"Emisi karbon dari hutan itu berasal dari penggunaan lahan pertanian, alih fungsi hutan, APL, dll. Alih fungsi hutan tetap diperbolehkan tetapi harus lebih cermat dalam memanfaatkannya sehingga anak cucu kita masih bisa menikmati"



Ketua AMAN Sulawesi Tengah
Rizal Mahfud :

"Terkait dengan penyiapan masyarakat dalam implementasi REDD+ agar masyarakat betul-betul memahami REDD+ ini, baru-baru ini kami melakukan di Banggai dan Tojo Una-Una. Ke depannya, kita akan melakukan hal yang sama di komunitas lain yang ada di 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah"

Kabar Sulawesi Tengah

UN-REDD Programme Indonesia Mempererat Hubungan dengan Media di Sulawesi Tengah

Dukungan masyarakat merupakan salah satu kunci sukses upaya pembangunan kapasitas pelaksanaan program REDD+ di Sulawesi Tengah, dan media merupakan penghubung antara masyarakat dan UN-REDD Programme Indonesia. Oleh sebab itu, pada 9 Februari 2011 tim UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadakan media gathering.

Dengan maksud mengenal perwakilan masing-masing media dengan lebih baik melalui format acara yang santai, diaturlah acara bincang-bincang di Palu. Acara dibuka oleh Ir. Nahardi, Kepala Dishut Sulteng.

Paparan dilanjutkan dengan penjelasan singkat tentang UN-REDD oleh Dr. Machfudh dari tim UN-REDD Programme

Indonesia. Para jurnalis yang hadir tertarik mengenal UN-REDD Programme Indonesia dan *pilot province Sulawesi Tengah* lebih jauh, dan mulai mengajukan beragam pertanyaan. Hadir di antara media yang diundang hari itu adalah perwakilan dari Kompas, Media Indonesia, dan Nuansa Pos.



▲ Panitia dari dinas kehutanan Sulteng dan UN-REDD Programme Indonesia berfoto bersama dengan para jurnalis se usai acara Media Gathering di Palu.



▲ Para jurnalis dari berbagai media di Sulawesi Tengah berbincang-bincang sambil mendengarkan penjelasan mengenai UN-REDD Programme Indonesia dan berbagai programnya di Sulawesi Tengah.

Kabar UN-REDD Programme Indonesia

UN-REDD Programme Indonesia Bina Kerja Sama Tim

Dalam rangka menyambut tahun baru dengan semangat baru, PMU UN-REDD Programme Indonesia mengadakan kegiatan rapat membahas dan merumuskan laporan kemajuan 2010, rencana kerja tahun 2011, dan prosedur operasi standar di Bandung, (7-8 Januari 2011).

Kegiatan ini dilakukan untuk lebih mematangkan persiapan menghadapi pertemuan Program Executive Board pada tanggal 12 Januari 2011 yang diharapkan akan mensahkan dokumen-dokumen tersebut.

Selain untuk mematangkan persiapan menghadapi pertemuan PEB, para staf proyek termasuk Fasilitator Regional UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah juga melakukan kegiatan *outbound* untuk meningkatkan kerja sama tim dan semangat kebersamaan.

Berbagai kegiatan *outbound* yang dilakukan termasuk *paint ball* dan berbagai permainan lain, diharapkan dapat membantu menyegarkan para staf serta meningkatkan semangat kerja menghadapi tahun baru.



Suasana rapat tim UN-REDD Programme Indonesia membahas laporan kemajuan 2010 dan rencana kerja 2011.



Tim UN-REDD Programme Indonesia dalam salah satu permainan *outbound* untuk meningkatkan kerja sama tim di Bandung.

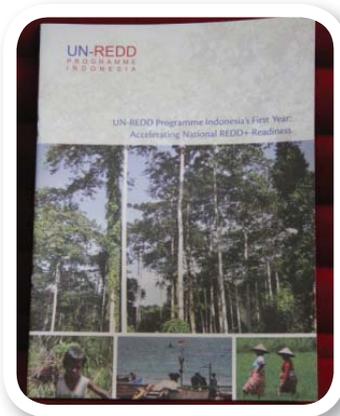
Publikasi Terbaru



- Laporan Lengkap Delegasi Kementerian Kehutanan RI pada UNFCCC COP-16 di Cancun, Meksiko



- Rekomendasi Kebijakan: Instrumen *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) bagi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal yang akan terkena Dampak Kegiatan REDD+



Tahun Pertama UN-REDD Programme Indonesia :
Mempercepat Kesiapan REDD+



Brosur :

- UN-REDD Programme Indonesia
- Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ di Sulawesi Tengah
- Program UN-REDD di Sulawesi Tengah

Publikasi ini dapat diperoleh di kantor PMU UN-REDD Programme Indonesia

Hubungi kami :

Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV, Lantai 5, Ruang 525C
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5795 1505
Faks: +62 21 574 6748

Atau silakan kirim email ke :

nanda.febriani@un-redd.or.id

Kerja sama antara:



UN-REDD
PROGRAMME
The United Nations Collaborative Programme
on Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation in Developing Countries

